

Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Semarang

Alif Wulan Romandani¹, Shella Kartika Dewi², Nila Zulfiyanti³, Syifa Khoirul Ummah⁴,
Margi Wahono⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: alifwulan2910@students.unnes.ac.id, shellakartikadewikartika@students.unnes.ac.id,
nilazulfiyanti04@students.unnes.ac.id, syifakuu24@students.unnes.ac.id,
margi85@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

Strengthening nationalism among the younger generation has become an important issue amid the rapid development of globalization and information technology, making the Flag Raising Troop (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka or Paskibraka) Program a strategic medium for instilling Pancasila values and national insight. This study aims to analyze the role of National Unity and Political Agency in Semarang Regency (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik or Bakesbangpol) in the implementation of the selection process for the Flag Raising Troop Candidates (Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka or Capaska) at the regency level. This research employed a qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation, which were analyzed using Soerjono Soekanto's role theory. The findings reveal that Bakesbangpol of Semarang Regency serves as the primary coordinator in the Capaska selection process, covering recruitment, selection, education and training, as well as the development of Pancasila ideology, while also facing challenges related to participants' physical and mental readiness, strengthening youth nationalism, digitalization of the selection system, limited personnel, budget constraints, cross-sectoral coordination, and technical issues within the digital system. Therefore, strengthening institutional capacity, optimizing partnerships, enhancing coordination, and developing supporting systems are necessary to reinforce the role of Bakesbangpol in implementing an effective, transparent, and accountable Capaska selection process aimed at fostering a younger generation with strong Pancasila values and national character.

Keywords: *Young Generation, Role of Bakesbangpol, Capaska, Paskibraka, Nationalism*

ABSTRAK

Pembinaan nasionalisme generasi muda menjadi isu penting di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi informasi, sehingga Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menjadi salah satu sarana strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Capaska) tingkat kabupaten. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teori peran Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Semarang berperan sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan seleksi Capaska mulai dari tahap rekrutmen, seleksi, pendidikan dan pelatihan, hingga pembinaan ideologi Pancasila, serta menghadapi tantangan berupa kesiapan fisik dan mental peserta, penguatan nasionalisme generasi muda, digitalisasi sistem seleksi, keterbatasan personel, keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektoral, dan kendala teknis sistem digital. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi kemitraan, peningkatan koordinasi, dan pengembangan sistem pendukung diperlukan untuk memperkuat peran

Bakesbangpol dalam mewujudkan seleksi Capaska yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pembentukan generasi muda yang berkarakter Pancasila.

Kata Kunci: Generasi Muda, Peran Bakesbangpol, Capaska, Paskibraka, Nasionalisme

A. PENDAHULUAN

Generasi muda merupakan kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang di tengah kemajuan teknologi serta arus globalisasi yang semakin pesat. Perkembangan tersebut membawa berbagai dampak positif, seperti kemudahan akses terhadap informasi dan komunikasi. Di sisi lain, perkembangan tersebut berpotensi memengaruhi moral, identitas nasional, serta rasa cinta tanah air pada generasi muda. Oleh karena itu, pembinaan karakter nasionalis menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan agar generasi muda tetap memiliki kepribadian yang kuat, berakhlak baik, serta mampu mempertahankan nilai-nilai kebangsaan di tengah perkembangan zaman. Penanaman nilai nasionalisme diperlukan untuk membentuk karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, serta memiliki rasa peduli terhadap bangsa dan negara. Dengan adanya penanaman nilai nasionalisme, generasi muda diharapkan mampu menjadi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan semangat kebangsaan yang tinggi¹.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam membentuk karakter nasionalis generasi muda adalah melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Kegiatan Paskibraka tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis dalam pelaksanaan upacara pengibaran bendera, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter bagi para peserta. Melalui proses seleksi, pelatihan, dan pembinaan yang terstruktur, anggota Paskibraka diajarkan mengenai pentingnya disiplin, tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan, serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan tersebut mampu memberikan pengalaman yang mendidik sekaligus membentuk semangat nasionalisme pada generasi muda sehingga mereka memiliki kesadaran untuk mencintai dan mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pasukan Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka pada upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Tradisi pengibaran bendera tersebut telah berlangsung sejak tahun 1946 dan menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Gagasan pembentukan Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Husein Mutahar sebagai upaya menanamkan semangat nasionalisme, persatuan, dan cinta tanah air pada generasi muda Indonesia pascakemerdekaan. Seiring perkembangan zaman, Paskibraka tidak lagi hanya dipandang sebagai pasukan pengibar bendera dalam kegiatan seremonial kenegaraan, melainkan juga sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berorientasi pada pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan. Melalui berbagai tahapan pembinaan yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan, anggota Paskibraka dibentuk agar memiliki kemampuan fisik, mental, dan sikap yang baik sehingga mampu menjadi teladan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dalam proses pembinaannya, peserta tidak hanya diberikan pelatihan baris-berbaris dan kedisiplinan, tetapi juga pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila, pentingnya persatuan, loyalitas, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, kegiatan Paskibraka memiliki peran strategis sebagai sarana pembentukan generasi muda yang

¹ Margaretha Evi and Abu Prabowo, "Membangun Karakter Nasionalisme Pada Generasi Milenial Di Era Globalisasi," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2022), doi:10.47233/jppisb.v1i2.564.

berintegritas, berjiwa nasionalis, bertanggung jawab, serta memiliki karakter dan nilai kebangsaan yang kuat².

Proses pemilihan anggota Paskibraka dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten dan/atau kota, provinsi, hingga tingkat pusat. Seleksi di tingkat kabupaten atau kota diikuti oleh siswa sekolah menengah atas sederajat, khususnya kelas X (sepuluh) dengan rentang usia 15 hingga 18 tahun. Seleksi tersebut bertujuan untuk memperoleh calon anggota Paskibraka terbaik yang nantinya akan bertugas dalam pelaksanaan upacara tingkat kabupaten dan/atau kota. Selanjutnya, peserta terbaik dari setiap daerah akan dikirim untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi. Pada tahap ini, peserta kembali menjalani berbagai proses penilaian untuk menentukan anggota terbaik yang akan bertugas di tingkat provinsi. Adapun pada tingkat pusat, peserta terpilih merupakan perwakilan terbaik dari setiap provinsi yang kemudian mengikuti pelatihan nasional dan berkesempatan menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional.

Dalam pelaksanaan program Paskibraka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting sebagai penyelenggara utama dalam proses seleksi, pelatihan, serta pembinaan ideologi bagi calon anggota Paskibraka. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya menitikberatkan pada latihan fisik dan keterampilan baris-berbaris, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai Pancasila, semangat nasionalisme, dan pembentukan pola pikir yang mencintai bangsa dan negara. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 mengenai Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Peraturan tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan pembinaan Paskibraka sebagai upaya membentuk generasi muda yang memiliki karakter Pancasila, disiplin, dan semangat nasionalisme yang kuat.

Meskipun Program Paskibraka telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2023, implementasinya di daerah masih menghadapi persoalan tata kelola dan kewenangan. Pergeseran penyelenggaraan dari perangkat daerah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikbudpora) menuntut koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak. Selain itu, pelaksanaan seleksi yang harus objektif, transparan, dan akuntabel juga menjadi tantangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran Bakesbangpol dalam seleksi Capaska serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh penulis, dalam periode 2024 hingga 2025, Bakesbangpol Kabupaten Semarang telah melaksanakan berbagai kegiatan seleksi untuk Paskibraka di Kabupaten Semarang. Tabel berikut menunjukkan jumlah peserta seleksi dari tahun ke tahun:

Tabel 1. Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Kabupaten Semarang Tahun 2024-2026

Tahun	Tahapan Seleksi	Jumlah Pendaftar/Lolos
2024	Administrasi	334
	TWK dan TIU	332

² W Chairunnisa et al., "IMPLIKASI SEJARAH PASKIBRA TERHADAP KEGIATAN EKSAKURIKULER PRAMUKA," *Jurnal Bakti Sosial* 3, no. 2 (2023), doi:10.63736/jbs.v3i2.149.

	Kesehatan	166
	Parade	106
	PBB, Kesamaptaan dan Kepribadian	75
2025	Administrasi	434
	TWK	401
	TIU	384
	Kesehatan dan Parade	150
	PBB, Kesamaptaan dan Kepribadian	77
2026	Administrasi	421
	TWK dan TIU	316
	TIU	303
	Kesehatan dan Parade	172
	PBB, Kesamaptaan dan Kepribadian	77

Sumber: Bidang Kesatuan Bangsa pada Bakesbangpol Kab. Semarang (2026)

Pada tahun 2024, proses seleksi Capaska diawali dengan tahap administrasi yang diikuti oleh 334 peserta. Selanjutnya, peserta mengikuti seleksi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Intelegensia Umum (TIU) dengan jumlah peserta tersisa sebanyak 332 orang. Pada tahap kesehatan, jumlah peserta berkurang menjadi 166 orang, kemudian kembali diseleksi pada tahap parade menjadi 106 peserta. Tahap akhir berupa seleksi PBB, kesamaptaan, dan kepribadian menghasilkan 75 peserta yang dinyatakan lolos. Proses seleksi tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan dilakukan secara ketat untuk memperoleh calon Paskibraka yang memiliki kesiapan fisik, intelektual, mental, dan karakter kebangsaan yang baik.

Pada tahun 2025, jumlah peserta pada tahap administrasi meningkat menjadi 434 orang. Tahap TWK menghasilkan 401 peserta yang lolos, kemudian berkurang menjadi 384 peserta pada tahap TIU. Selanjutnya, peserta mengikuti seleksi kesehatan dan parade yang menyisakan 150 peserta. Pada tahap akhir PBB, kesamaptaan, dan kepribadian, jumlah peserta yang dinyatakan lolos sebanyak 77 orang. Peningkatan jumlah pendaftar pada tahun ini menunjukkan tingginya minat pelajar untuk mengikuti seleksi Paskibraka sebagai wadah pembinaan karakter, disiplin, dan wawasan kebangsaan.

Sementara itu, pada tahun 2026 jumlah peserta administrasi tercatat sebanyak 421 orang. Setelah mengikuti tahapan TWK dan TIU, jumlah peserta berkurang menjadi 316 orang dan pada tahap berikutnya diseleksi menjadi 303 peserta. Tahap kesehatan dan parade menyisakan 172 peserta, sebelum akhirnya mengikuti seleksi PBB, kesamaptaan, dan kepribadian. Dari seluruh rangkaian seleksi tersebut, sebanyak 77 peserta dinyatakan lolos sebagai calon anggota Paskibraka. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi Capaska dilaksanakan secara konsisten dan terstruktur guna memperoleh peserta terbaik yang memenuhi standar pembinaan Paskibraka.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas Paskibraka sebagai sarana pembentukan karakter, nasionalisme, dan kepemimpinan generasi muda. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan seleksi Capaska pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 masih relatif terbatas. Padahal, perubahan regulasi tersebut membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan kewenangan, pola koordinasi kelembagaan, serta tanggung jawab pembinaan ideologi Pancasila di tingkat daerah. Berdasarkan kondisi tersebut,

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bakesbangpol Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan seleksi Capaska, termasuk berbagai tantangan dan upaya penguatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas Paskibra sebagai sarana pembentukan karakter, nasionalisme, dan kepemimpinan generasi muda. Pardede (2022) menunjukkan bahwa kegiatan Paskibra membentuk disiplin dan tanggung jawab siswa³, sementara Anggraeni (2023) menekankan kontribusinya terhadap nasionalisme dan kedisiplinan⁴. Putra (2018) juga menemukan bahwa Paskibra berperan dalam pembentukan jiwa kepemimpinan peserta didik⁵. Namun, kajian mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan seleksi Capaska pasca Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bakesbangpol Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan seleksi Capaska beserta tantangan dan upaya penguatannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tetapi juga menganalisis bagaimana implementasi peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Capaska) di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti melalui pengalaman, pandangan, dan praktik yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Menurut Sugiyono (2023), pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dengan memperhatikan konteks sosial serta pengalaman partisipan penelitian⁶. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan seleksi Capaska tingkat kabupaten.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pelaksanaan seleksi Capaska, sedangkan wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan seleksi. Selain itu, dokumentasi berupa laporan kegiatan, arsip, foto, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program Paskibra digunakan sebagai data pendukung penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi Capaska tingkat kabupaten. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Analisis penelitian ini menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto (2013) yang menyatakan

³ Lukman Pardede et al., "Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibra Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di UPT SMP Negeri 37 Medan," *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 9 (2022), doi:10.54371/jiip.v5i9.877.

⁴ Friska Fitria Anggraeni, *Representasi Ekstrakurikuler Paskibra Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Dan Sikap Nasionalisme Pada Siswa Jurusan Ips Di Sman 6 Malang*, *Etheses UIN Malang*, 2023.

⁵ Nanda Lega Jaya Putra, "Upaya Pembentukan Jiwa Kepemimpinan Peserta Didik Melalui Kegiatan Paskibra," *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 10, no. 1 (2018).

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2nd ed. (TT. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung: Alfabeta, 2023).

bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status⁷. Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Teori tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara seleksi Paskibraka di daerah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Bakesbangpol Kabupaten Semarang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang, yang sebelumnya bernama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Perubahan nomenklatur dari kantor menjadi badan didasarkan pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bakesbangpol Kabupaten Semarang berpedoman pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang berlokasi di Jl. Brigjend Soediarso No. 34, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Bakesbangpol Kabupaten Semarang bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan daerah yang berkaitan dengan persatuan nasional dan politik. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang pada pasal 4 ayat (2) fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan administrasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk menjaga stabilitas daerah dan memupuk kohesi masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pemerintah lainnya. Bakesbangpol juga berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik masyarakat. Pembinaan tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, Bakesbangpol berkontribusi dalam identifikasi dini dan pencegahan konflik sosial di masyarakat. Dalam hal ini, instansi bekerja sama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah.

⁷ Soerjono Soekanto, "Sosiologi: Suatu Pengantar," *Journal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 2013.

2. Pengertian dan Tujuan Seleksi Capaska

Capaska mencakup peserta yang menjalani proses pelatihan dan seleksi sebelum secara resmi dilantik sebagai anggota Paskibraka. Anggota Capaska umumnya adalah siswa SMA atau setara yang telah lulus seleksi administrasi dan sedang mengikuti berbagai tahap seleksi, termasuk tes kepribadian, tes keterampilan baris-berbaris, tes kesadaran kebangsaan, dan tes fisik. Paskibraka sendiri merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan diperjelas dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pembentukan Paskibraka dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, serta pengukuhan Paskibraka (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).

Tujuan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka antara lain:

- a. Menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme
- b. Membentuk karakter pemuda yang disiplin dan bertanggung jawab
- c. Memberikan pengalaman berharga kepada generasi muda
- d. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa

3. Dasar Hukum Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka:

- a. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Perpres ini mengatur mengenai Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Program Paskibraka) yang dilaksanakan dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Program Paskibraka dilaksanakan kepada Paskibraka, Purnapaskibraka, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta terhadap aktivitas kepaskibrakaan. Paskibraka bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila⁸.
- b. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Dalam Peraturan ini Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIP adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila⁹.

4. Peran Bakesbangpol Dalam Seleksi Capaska

Menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda merupakan isu strategis yang semakin mendapat perhatian di tengah pesatnya transformasi sosial akibat perkembangan teknologi informasi, arus globalisasi, serta meningkatnya interaksi lintas budaya. Kondisi tersebut memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap identitas nasional dan berpotensi melemahkan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai kebangsaan. Di sisi lain, meningkatnya penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila

⁸ Peraturan Perundang-undangan, "PERPRES No. 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka," *Peraturan BPK*, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/205303/perpres-no-51-tahun-2022>.

⁹ Peraturan Perundang-undangan, "Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasuka Pengibar Bendera Pusak," *Peraturan BPK*, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/275193/peraturan-bpip-no-3-tahun-2022>.

melalui berbagai media digital semakin menegaskan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ideologi bangsa melalui penanaman nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda¹⁰.

Pembinaan wawasan kebangsaan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan formal, tetapi juga merupakan tugas bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Salah satu bentuk pembinaan yang dinilai efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan adalah melalui program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)¹¹. Seiring dengan perubahan kebijakan nasional yang menempatkan Paskibraka sebagai bagian dari upaya kaderisasi ideologi Pancasila, program ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai kegiatan seremonial pengibaran bendera, melainkan sebagai sarana pembentukan karakter dan pencetakan generasi muda yang berjiwa nasionalis serta berperan sebagai Duta Pancasila. Dalam konteks tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berperan sebagai lembaga nasional yang menyusun regulasi, pedoman seleksi, serta arah pembinaan ideologi Pancasila, sedangkan pemerintah daerah melalui Bakesbangpol bertindak sebagai pelaksana teknis yang mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan Paskibraka di daerah¹².

Implementasi kebijakan tersebut juga terjadi di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan seleksi dan pembinaan Capaska mengalami perubahan kelembagaan sejak tahun 2023. Sebelumnya, pengelolaan Paskibraka berada di bawah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikbudpora), namun setelah adanya kebijakan dari BPIP yang tidak lagi mewajibkan penanganan oleh perangkat daerah tertentu, tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang, khususnya Bidang Kesatuan Bangsa. Peralihan tersebut didasarkan pada tujuan utama pembinaan Paskibraka yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan kepemudaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda.

Perubahan kewenangan tersebut merupakan salah satu implikasi hukum dari berlakunya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Regulasi tersebut menempatkan Program Paskibraka sebagai bagian dari kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, sehingga orientasi penyelenggaraannya tidak lagi hanya berfokus pada kegiatan kepemudaan dan seremonial kenegaraan, tetapi juga pada pembinaan ideologi Pancasila. Dalam hukum administrasi negara, pelimpahan tugas kepada Bakesbangpol menunjukkan adanya penyesuaian kewenangan kelembagaan untuk memastikan tujuan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Oleh karena itu, peran Bakesbangpol dalam seleksi Capaska tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan pelaksanaan mandat regulasi yang berkaitan dengan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.

Dalam pelaksanaan seleksi, Bakesbangpol berperan sebagai koordinator utama yang mengawasi seluruh mekanisme seleksi agar berlangsung secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh BPIP. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut,

¹⁰ Gilang Zulfikar and Gigieh Cahya Permady, "Citra Wawasan Kebangsaan Generasi Muda: Suatu Kajian Terhadap Sikap Anti Radikalisme," *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 7, no. 2 (2021), doi:10.31949/educatio.v7i2.1063.

¹¹ Elly Nur Khayati and Ananta Prathama, "Peran Bakesbangpol Dalam Pembinaan Kegiatan Paskibraka Di Kabupaten Sidoarjo," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2024).

¹² Gilang Hardiono, Ermaya Suradinata, and Ahmad Averus, "Implementation of the Flag Raising Troops Program... - Google Scholar," *INFOKUM*, 2025.

Bakesbangpol Kabupaten Semarang bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Kodim 0714/Salatiga, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS), serta Purna Paskibraka Indonesia (PPI). Setiap instansi memiliki peran sesuai bidang keahliannya, seperti penilaian kesehatan oleh tenaga medis, penilaian parade dan baris-berbaris oleh unsur TNI, serta penilaian aspek intelektual, mental, dan kepribadian oleh tim yang telah ditetapkan. Seluruh hasil seleksi kemudian diinput ke dalam sistem sesuai dengan penilaian dewan juri sehingga proses seleksi dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan seleksi yang melibatkan berbagai instansi tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas menjadi aspek penting karena proses seleksi Capaska merupakan bentuk pelayanan publik yang harus menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh peserta. Dengan demikian, keberhasilan Bakesbangpol dalam membangun koordinasi lintas sektoral tidak hanya menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Peran Bakesbangpol tidak berhenti pada tahap seleksi. Setelah peserta dinyatakan lolos, Bakesbangpol juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta masa karantina selama 14 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Bakesbangpol melakukan koordinasi dengan sekolah, guru, pelatih, dan berbagai pihak terkait guna mendukung kelancaran kegiatan. Selama masa karantina, peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan fisik dan keterampilan pengibaran bendera, tetapi juga memperoleh pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, literasi digital, pendidikan karakter, serta pemahaman mengenai berbagai persoalan sosial yang berkembang di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Karantina ini bertujuan untuk menjaga fokus dan disiplin peserta. Selama masa pembinaan, pengawasan, dan evaluasi rutin dilakukan sekaligus menjadi umpan balik bagi perbaikan di masa mendatang.

Dengan demikian, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan seleksi administratif dan teknis semata, melainkan mencakup pembinaan ideologi, penguatan wawasan kebangsaan, pembentukan karakter, serta pengembangan kapasitas generasi muda secara berkelanjutan. Peran tersebut menunjukkan bahwa program Paskibraka telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mencetak generasi muda yang berkarakter Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, serta siap berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045¹³.

5. Tahapan Seleksi Capaska

Seleksi anggota Paskibraka dimulai di tingkat kabupaten atau kota, diikuti oleh calon Paskibraka yang diusulkan oleh sekolah masing-masing, khususnya siswa kelas X (Sepuluh)

¹³ Maulana Ibrahim, Ratna Sari Dewi, and Aryanti Dwi Untari, "PENGUATAN NILAI – NILAI KEBANGSAAN BAGI GENERASI MUDA DALAM MENINGKATKAN NASIONALISME (STUDI DESKRIPTIF BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SERANG)," *Untirta Civic Education Journal* 10, no. 2 (December 22, 2025): 83–96, doi:10.30870/UCEJ.V10I2.33628.

berusia minimal 15 tahun dan maksimal 18 tahun per tanggal 17 Agustus¹⁴. Para peserta calon Paskibraka Kabupaten Semarang diwajibkan untuk membuat akun. Selama proses pendaftaran, peserta calon Paskibraka diminta untuk melengkapi formulir dan mengunggah dokumen sebagai persyaratan melalui laman *website*, antara lain memperoleh surat izin dari kepala sekolah yang berstempel, memperoleh surat izin dari orang tua/wali, nilai akademik minimal berkategori baik, dan surat keterangan kesehatan. Seleksi administrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta telah memenuhi syarat dasar sebelum melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya, sekaligus menjadi langkah awal dalam menyaring calon peserta.

Wawasan Kebangsaan menjadi salah satu aspek penting yang harus dikuasai oleh generasi muda sebagai *agent of change*. Oleh karena itu, tahap selanjutnya adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diberlakukan untuk menguji penguasaan peserta secara spesifik terkait materi kebangsaan Indonesia yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Wawasan Kebangsaan penting untuk dipahami guna meningkatkan rasa nasionalisme serta memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional¹⁵.

Tahap selanjutnya adalah seleksi Tes Intelegensia Umum (TIU). Tes ini merupakan bagian penting dalam rangkaian seleksi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang guna menjaring calon anggota Paskibraka yang tidak hanya memiliki kemampuan fisik, tetapi juga kecerdasan intelektual dasar. Dalam keterangan, salah satu tim seleksi mengatakan bahwa tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar intelektual peserta, meliputi logika, penalaran, serta kemampuan analisis yang menjadi bekal penting bagi calon Paskibraka.

Langkah selanjutnya berupa seleksi kesehatan dan parade. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, TWK, dan TIU kemudian mengikuti seleksi kesehatan dan parade di tingkat kabupaten dengan melibatkan tenaga medis untuk memastikan kondisi fisik peserta. Aspek utama dalam tes ini mencakup tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kedua, pemeriksaan fisik dasar mencakup pemeriksaan kelainan fisik seperti bentuk kaki O atau X dan tidak memiliki telapak kaki datar (*flat foot*), serta memastikan peserta tidak bertato atau bertindik. Sementara itu, seleksi parade merupakan tahapan yang dilakukan untuk menilai penampilan, sikap tubuh, kedisiplinan, serta kemampuan dasar peserta dalam baris-berbaris. Pada tahap ini, peserta biasanya diminta berjalan dan berbaris di hadapan tim penilai untuk menilai postur tubuh, ketegasan gerakan, serta pembawaan diri peserta.

Peserta yang lolos pada seleksi kesehatan dan parade kemudian mengikuti tahapan selanjutnya yakni seleksi PBB dan kesamaptaan. PBB menjadi kriteria utama bagi calon anggota Paskibraka karena dapat membentuk karakter, seperti rasa persatuan, tanggung jawab, dan kedisiplinan, dalam melaksanakan perintah secara tepat dan cepat. Ketentuan pelaksanaan PBB telah dimuat dalam Peraturan Panglima TNI (Perpang) No. 58 tentang Peraturan Baris-berbaris (PBB) dan saat ini telah mengalami perubahan melalui Peraturan Panglima TNI No. 3 Tahun 2025, yang dapat dijadikan pedoman penilaian oleh juri.

¹⁴ Denni Pratama et al., "Sistem Informasi Seleksi Calon Anggota Paskibraka Menggunakan Metode Profile Matching," *Kopertip: Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika Dan Komputer* 7, no. 3 (2023), doi:10.32485/kopertip.v7i3.329.

¹⁵ Emilia Zahra and Ananta Prathama, "PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PELAKSANAAN SELEKSI PASKIBRAKA KABUPATEN SIDOARJO," *Journal Publicuho* 8, no. 1 (2025), doi:10.35817/publicuho.v8i1.627.

¹⁶ Nurmayana Siregar, "Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi," *Educate: Journal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022), doi:10.56114/edu.v1i2.398.

Selanjutnya, peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap seleksi kesamaptaaan. Seleksi kesamaptaaan merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengukur tingkat kebugaran dan ketahanan fisik peserta. Pada tahap ini, peserta mengikuti berbagai tes fisik seperti lari, *push-up*, *sit-up*, dan *shuttle run*. Melalui seleksi kesamaptaaan, Bakesbangpol dan tim pelatih dapat menilai daya tahan, kekuatan, kelincahan, serta kesiapan fisik peserta sebelum peserta ditetapkan sebagai anggota Paskibraka.

Tahapan seleksi berikutnya yang harus diikuti oleh para peserta adalah tes kepribadian. Paskibraka membutuhkan pasukan dengan kepribadian berkarakter unggul, sehingga seleksi kepribadian melalui wawancara menjadi salah satu tahap penting yang perlu dilaksanakan. Selain kepribadian, seleksi ini juga menilai minat dan bakat peserta. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah menemukan calon yang memiliki karakteristik kepribadian yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Paskibraka.

6. Tantangan dan Upaya Penguatan Peran Bakesbangpol Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Seleksi Capaska

Pelaksanaan seleksi Capaska merupakan bagian penting dalam upaya pembinaan generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Program Paskibraka tidak hanya bertujuan menyiapkan peserta untuk melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, kepemimpinan, kedisiplinan, serta penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan agar tujuan pembinaan tersebut dapat tercapai secara optimal. Dari implementasi kebijakan, berbagai tantangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dan kondisi empiris di lapangan. Secara normatif, program Paskibraka dirancang sebagai program kaderisasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi kelembagaan, serta infrastruktur pendukung masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas lembaga pelaksana dalam menjalankan mandat yang diberikan.

Tantangan tersebut meliputi kesiapan fisik dan mental peserta, penguatan nasionalisme generasi muda di tengah arus globalisasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses seleksi. Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang, terdapat pula hambatan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan seleksi Capaska. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya penguatan peran Bakesbangpol Kabupaten Semarang agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

a. Tantangan Kesiapan Fisik dan Mental Peserta dalam Seleksi Paskibraka

Kesiapan fisik dan mental peserta merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan seleksi dan pembinaan Paskibraka. Peserta tidak hanya dituntut memiliki kemampuan baris-berbaris yang baik, tetapi juga harus memiliki kondisi fisik yang prima, daya tahan yang kuat, kemampuan bekerja sama dalam tim, serta kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tahapan seleksi dan pembinaan. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan tingkat kesiapan fisik dan mental pada setiap peserta. Sebagian peserta masih mengalami kesulitan dalam mengikuti latihan fisik yang intensif, sementara peserta lainnya memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan pola pembinaan yang menekankan kedisiplinan,

tanggung jawab, dan kepemimpinan. Selain itu, rasa gugup, kurang percaya diri, dan kemampuan adaptasi yang berbeda-beda juga dapat memengaruhi performa peserta selama proses seleksi berlangsung.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan Paskibraka tidak dapat hanya berfokus pada aspek teknis semata, melainkan perlu mencakup pembentukan karakter dan penguatan mental peserta. Keberhasilan program Paskibraka pada dasarnya tidak hanya diukur dari kemampuan peserta dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam menerapkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Bakesbangpol Kabupaten Semarang perlu memperkuat pola pembinaan peserta Paskibraka melalui sinergi dan kerja sama yang lebih intensif dengan pihak sekolah. Kolaborasi ini penting karena sekolah merupakan lingkungan yang paling dekat dengan peserta dalam proses pembentukan karakter dan pengembangan potensi diri. Bentuk kerja sama dapat dilakukan melalui pemantauan perkembangan peserta oleh guru pembina, pemberian penguatan karakter dan wawasan kebangsaan di lingkungan sekolah, serta koordinasi berkala antara Bakesbangpol dan sekolah terkait kesiapan fisik, mental, dan akademik peserta. Selain itu, sekolah dapat berperan dalam memberikan dukungan psikologis dan motivasi kepada peserta selama mengikuti tahapan seleksi dan pelatihan. Dengan adanya sinergi tersebut, pembinaan peserta Paskibraka tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik dan kemampuan teknis pengibaran bendera, tetapi juga pada penguatan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, nasionalisme, dan jiwa kepemimpinan secara berkelanjutan. Melalui pola pembinaan yang terintegrasi antara Bakesbangpol dan sekolah, diharapkan peserta memiliki kesiapan yang lebih optimal dalam menghadapi seluruh rangkaian kegiatan Paskibraka serta mampu menjadi teladan bagi generasi muda di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain itu, keterlibatan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) sebagai mentor dapat menjadi alternatif untuk membantu peserta beradaptasi dengan lingkungan pembinaan melalui berbagi pengalaman, motivasi, dan pendampingan selama proses seleksi dan pelatihan. Melalui pendekatan tersebut, proses pembinaan tidak hanya menghasilkan anggota Paskibraka yang siap secara fisik, tetapi juga memiliki mental yang tangguh dan karakter kebangsaan yang kuat.

b. Tantangan Penguatan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi

Perkembangan globalisasi dan media sosial memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan generasi muda. Kemudahan dalam mengakses informasi tentunya membawa dampak positif bagi pengguna, seperti kemudahan berkomunikasi atau mencari informasi guna menambah wawasan. Namun demikian, arus informasi yang tidak terbatas juga dapat memengaruhi pola pikir dan identitas kebangsaan generasi muda apabila tidak diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi secara kritis. Generasi muda saat ini menghadapi berbagai pengaruh budaya luar yang berpotensi menggeser nilai-nilai kebangsaan apabila tidak disertai dengan pemahaman yang kuat mengenai identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila. Penelitian dalam *Jurnal Global Citizen* menjelaskan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam menanamkan jiwa nasionalisme pada generasi muda di era globalisasi¹⁷.

¹⁷ Elisa Puspita Ratri and Fatma Ulfatun Najicha, "URGENSI PANCASILA DALAM MENANAMKAN JIWA NASIONALISME PADA GENERASI MUDA DI ERA GLOBALISASI," *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022), doi:10.33061/jgz.v11i1.7455.

Dalam konteks tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Semarang memiliki peran strategis dalam memperkuat pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui program Paskibraka. Penguatan peran tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan materi pembinaan yang lebih kontekstual dengan tantangan generasi muda saat ini, seperti pendidikan literasi digital, etika bermedia sosial, pencegahan penyebaran paham radikalisme, serta penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan Paskibraka dapat dikembangkan sebagai sarana kaderisasi generasi muda yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas pengibaran bendera, tetapi juga sebagai media pembentukan Duta Pancasila yang mampu menjadi teladan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Penguatan nasionalisme juga dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, simulasi pemecahan masalah sosial, serta program pengabdian masyarakat yang melibatkan anggota Paskibraka dan Purna Paskibraka. Melalui berbagai kegiatan tersebut, nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diinternalisasikan melalui pengalaman nyata sehingga mampu membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat dan mampu menghadapi tantangan globalisasi secara bijaksana.

c. Digitalisasi Sistem Seleksi Paskibraka sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Efektivitas

Perkembangan teknologi informasi turut mendorong perubahan dalam penyelenggaraan seleksi Paskibraka yang saat ini dilaksanakan melalui sistem berbasis digital. Pemanfaatan teknologi dalam proses seleksi memberikan berbagai keuntungan, antara lain kemudahan dalam proses pendaftaran, pengelolaan data peserta yang lebih sistematis, serta pelaksanaan penilaian yang lebih transparan dan objektif. Sistem digital juga memungkinkan peserta untuk memantau perkembangan tahapan seleksi secara langsung sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi yang dilaksanakan.

Menurut Maulidanitamyizi, Hoiriyah, dan Hozairi (2023), penerapan sistem berbasis teknologi dalam proses seleksi mampu membantu pengambilan keputusan secara lebih efektif, objektif, dan terukur. Pemanfaatan teknologi juga dapat meminimalkan kesalahan administrasi serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data peserta. Dengan demikian, digitalisasi sistem seleksi menjadi salah satu inovasi yang mendukung terwujudnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan seleksi Paskibraka¹⁸.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan sistem digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem yang tersedia. Oleh karena itu, penguatan peran Bakesbangpol Kabupaten Semarang dalam bidang digitalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas operator sistem melalui pelatihan teknis secara berkala, penyusunan standar operasional prosedur dalam penanganan kendala teknis, serta pelaksanaan evaluasi sistem secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan sistem informasi pendukung yang terintegrasi dengan media komunikasi resmi juga dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan informasi tetap tersampaikan kepada peserta secara cepat dan akurat. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga menjadi

¹⁸ Moh Fahmi Maulidanitamyizi, Hoiriyah Hoiriyah, and Hozairi Hozairi, "Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Anggota Paskibraka Kabupaten Pamekasan," *J-INTECH* 11, no. 1 (2023), doi:10.32664/j-intech.v11i1.843.

instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan seleksi Capaska.

7. Hambatan Bakesbangpol Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Seleksi Capaska

Berbagai tantangan yang berkaitan dengan kesiapan peserta, penguatan nasionalisme, dan pemanfaatan teknologi menunjukkan bahwa pelaksanaan program Paskibraka memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bakesbangpol Kabupaten Semarang, dalam pelaksanaan seleksi Capaska masih terdapat beberapa hambatan yang perlu dikelola secara optimal. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jumlah personel, keterbatasan anggaran, kompleksitas koordinasi lintas sektoral, serta kendala teknis berupa gangguan atau *maintenance* pada sistem digital yang digunakan selama proses seleksi.

Keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan seleksi Capaska. Kondisi ini menjadi tantangan mengingat luasnya cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Semarang, mulai dari proses rekrutmen, seleksi administrasi, koordinasi dengan berbagai instansi, hingga pembinaan peserta yang dinyatakan lolos seleksi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri karena seluruh tahapan seleksi, pendidikan dan pelatihan, karantina, serta pembinaan peserta memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai.

Hambatan lainnya berkaitan dengan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti sekolah, TNI, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan. Perbedaan jadwal, tugas, dan mekanisme kerja masing-masing instansi sering kali menjadi tantangan dalam menyelaraskan pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, penerapan sistem seleksi berbasis digital juga tidak terlepas dari kendala teknis berupa gangguan sistem maupun proses *maintenance* yang dapat menghambat penginputan data dan penyampaian informasi kepada peserta.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan seleksi Capaska tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi hukum administrasi karena berkaitan dengan kapasitas organisasi dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila hambatan tersebut tidak dikelola secara optimal, maka tujuan pembinaan ideologi Pancasila dan kaderisasi generasi muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 berpotensi tidak tercapai secara maksimal.

8. Upaya Penguatan Peran Bakesbangpol Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Seleksi Capaska

Berbagai hambatan yang ditemukan menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi Capaska tidak hanya membutuhkan kesiapan peserta dan dukungan teknologi, tetapi juga memerlukan kapasitas kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya yang dapat mendukung penguatan peran Bakesbangpol Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan seleksi dan pembinaan Paskibraka.

Dalam menghadapi keterbatasan personel, penguatan peran Bakesbangpol Kabupaten Semarang dapat dilakukan melalui optimalisasi kemitraan dengan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Semarang. Keterlibatan alumni Paskibraka dalam kegiatan pendampingan peserta, administrasi, dokumentasi, maupun dukungan teknis di lapangan dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Selain membantu mengurangi beban kerja personel, langkah tersebut juga dapat memperkuat proses kaderisasi dan menjaga keberlanjutan pembinaan generasi muda melalui keterlibatan aktif alumni Paskibraka.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, penguatan peran Bakesbangpol Kabupaten Semarang dapat dilakukan melalui pengembangan pola kolaborasi berbasis pemanfaatan sumber daya bersama (*resource sharing*) dengan berbagai instansi mitra. Pemanfaatan fasilitas, sarana, prasarana, maupun tenaga pendukung yang dimiliki oleh instansi terkait dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas pembinaan peserta. Pola kolaborasi semacam ini juga berpotensi memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung keberhasilan program Paskibraka.

Sementara itu, dalam menghadapi tantangan koordinasi lintas sektoral, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur melalui penyusunan kalender kegiatan terpadu sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Kalender tersebut dapat memuat jadwal seluruh tahapan seleksi, pembinaan, dan evaluasi sehingga setiap instansi memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, pembentukan forum koordinasi Paskibraka yang dilaksanakan secara berkala dapat menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, menyelesaikan permasalahan yang muncul, serta memperkuat sinergi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi Capaska.

Dalam menghadapi kendala teknis pada sistem digital, penguatan peran Bakesbangpol Kabupaten Semarang dapat dilakukan melalui penyusunan mekanisme mitigasi gangguan sistem, peningkatan kapasitas operator, serta penyediaan saluran komunikasi alternatif yang dapat digunakan ketika sistem utama mengalami gangguan atau *maintenance*. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa proses seleksi tetap berjalan sesuai jadwal dan informasi dapat tersampaikan kepada peserta secara tepat waktu. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kinerja sistem digital juga diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan guna mendukung efektivitas pelaksanaan seleksi pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan berbagai tantangan, hambatan, dan upaya penguatan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan seleksi Capaska tidak hanya ditentukan oleh kualitas peserta yang mengikuti seleksi, tetapi juga oleh kemampuan Bakesbangpol Kabupaten Semarang dalam mengelola sumber daya, membangun koordinasi lintas sektoral, serta beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi kemitraan, peningkatan koordinasi, dan pengembangan sistem pendukung menjadi langkah penting untuk memperkuat peran Bakesbangpol Kabupaten Semarang dalam mewujudkan pelaksanaan seleksi Capaska yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembentukan generasi muda yang berkarakter Pancasila serta berwawasan kebangsaan.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan seleksi Capaska tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Bakesbangpol Kabupaten Semarang perlu memperkuat sumber daya manusia, optimalisasi sistem seleksi berbasis digital, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan seleksi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas pembinaan Paskibraka pasca pengukuhan atau melakukan studi komparatif pada daerah lain untuk memperkaya kajian mengenai implementasi Program Paskibraka di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Friska Fitria. *Representasi Ekstrakurikuler Paskibra Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Dan Sikap Nasionalisme Pada Siswa Jurusan Ips Di Sman 6 Malang. Etheses UIN Malang*, 2023.
- Chairunnisa, W, Dwi Retno, Husnatun Leony Harahap, and M. Faisal Buchori. "IMPLIKASI SEJARAH PASKIBRA TERHADAP KEGIATAN EKSAKURIKULER PRAMUKA." *Jurnal Bakti Sosial* 3, no. 2 (2023). doi:10.63736/jbs.v3i2.149.
- Evi, Margaretha, and Abu Prabowo. "Membangun Karakter Nasionalisme Pada Generasi Milenial Di Era Globalisasi." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2022). doi:10.47233/jppisb.v1i2.564.
- Fahira, Hilda, and Dinie Anggraeni Dewi. "Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila Di Era Globalisasi Pada Ada Generasi Muda Dengan Mempertahankan Sikap Nasionalisme." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6AD.
- Hardiono, Gilang, Ermaya Suradinata, and Ahmad Averus. "Implementation of the Flag Raising Troops Program... - Google Scholar." *INFOKUM*, 2025.
- Ibrohim, Maulana, Ratna Sari Dewi, and Aryanti Dwi Untari. "PENGUATAN NILAI – NILAI KEBANGSAAN BAGI GENERASI MUDA DALAM MENINGKATKAN NASIONALISME (STUDI DESKRIPTIF BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SERANG)." *Untirta Civic Education Journal* 10, no. 2 (December 22, 2025): 83–96. doi:10.30870/UCEJ.V10I2.33628.
- Khayati, Elly Nur, and Ananta Prathama. "Peran Bakesbangpol Dalam Pembinaan Kegiatan Paskibraka Di Kabupaten Sidoarjo." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2024).
- Maulidanitamyizi, Moh Fahmi, Hoiriyah Hoiriyah, and Hozairi Hozairi. "Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Anggota Paskibraka Kabupaten Pamekasan." *J-INTECH* 11, no. 1 (2023). doi:10.32664/j-intech.v11i1.843.
- Siregar, Nurmayana. "Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi." *Educate: Journal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022). doi:10.56114/edu.v1i2.398.
- Pardede, Lukman, Kondios Meidarlin Pasaribu, Monalisa M Siahaan, Angel Mayland Santika Br. Sinaga, Aliando Tinambunan, and Ria Anggreni Safitri. "Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibra Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di UPT SMP Negeri 37 Medan." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 9 (2022). doi:10.54371/jiip.v5i9.877.
- Pratama, Denni, Nining Rahaningsih, Fadhil Muhamad Basysyar, and Moh. Yahya. "Sistem Informasi Seleksi Calon Anggota Paskibraka Menggunakan Metode Profile Matching." *Kopertip : Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika Dan Komputer* 7, no. 3 (2023). doi:10.32485/kopertip.v7i3.329.
- Peraturan Perundang-undangan. "Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasuka Pengibar Bendera Pusak." *Peraturan BPK*, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/275193/peraturan-bpip-no-3-tahun-2022>.
- . "PERPRES No. 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka." *Peraturan BPK*, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/205303/perpres-no-51-tahun-2022>.
- Putra, Nanda Lega Jaya. "Upaya Pembentukan Jiwa Kepemimpinan Peserta Didik Melalui Kegiatan Paskibra." *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 10, no. 1 (2018).

- Puspita Ratri, Elisa, and Fatma Ulfatun Najicha. "URGENSI PANCASILA DALAM MENANAMKAN JIWA NASIONALISME PADA GENERASI MUDA DI ERA GLOBALISASI." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022). doi:10.33061/jgz.v11i1.7455.
- Septiano, Andika Kavin, and Fatma Ulfatun Najicha. "UPAYA PENINGKATAN RASA NASIONALISME DENGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEPADA GENERASI MUDA DI ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022). doi:10.33061/jgz.v11i1.7460.
- Soekanto, Soerjono. "Sosiologi: Suatu Pengantar." *Journal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd ed. TT. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung: Alfabeta, 2023.
- Zahra, Emilia, and Ananta Prathama. "PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PELAKSANAAN SELEKSI PASKIBRAKA KABUPATEN SIDOARJO." *Journal Publicuho* 8, no. 1 (2025). doi:10.35817/publicuho.v8i1.627.
- Zulfikar, Gilang, and Gigieh Cahya Permady. "Citra Wawasan Kebangsaan Generasi Muda: Suatu Kajian Terhadap Sikap Anti Radikalisme." *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 7, no. 2 (2021). doi:10.31949/educatio.v7i2.1063.